

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian harus dilakukan karena sektor pertanian memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pembangunan pertanian diarahkan pada upaya peningkatan mutu, produksi dan pemasaran hasil pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan mendorong kesempatan berusaha (Kementan, 2021). Pembangunan pertanian dapat diwujudkan dari adanya motivasi petani untuk meningkatkan kemampuan dirinya dengan melakukan kemandirian meraih peluang dari berbagai potensi yang ada. Kemandirian petani dapat dilihat dari bagaimana petani mampu memanfaatkan teknologi pertanian, mengembangkan kreativitas yang dapat menjadi sumber inovasi dalam meningkatkan produktivitas usahatani. Petani yang menghasilkan produktivitas tinggi akan menghasilkan pendapatan yang tinggi dan memungkinkan untuk menabung dan mengakumulasi modal (Nasution *et al.*, 2023).

Komoditas pertanian yang memiliki peluang besar dalam upaya peningkatan pendapatan petani salah satunya yaitu tembakau. Tembakau merupakan tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan termasuk produk ekspor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Tembakau digunakan untuk bahan baku industri rokok yang diminati oleh masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri sehingga tembakau banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia. Badan

pusat statistik mencatat bahwa nilai ekspor tembakau nasional pada tahun 2021 mencapai US\$ 73,84 juta atau sekitar Rp1,06 triliun dengan volume ekspor Indonesia mencapai 7,65 juta kg (BPS, 2022). Tembakau memiliki jenis yang bermacam-macam, baik dari segi usahatani maupun dari bentuk penjualannya. Hasil tembakau dapat dijual dalam bentuk daun basah dan daun kering, penjualan daun basah yaitu langsung ke pengumpul tanpa melalui proses lebih lanjut sedangkan daun kering dijual dalam bentuk rajangan (Nur & Salim, 2014).

Daerah penghasil tembakau di Indonesia yang sudah cukup terkenal yaitu Kabupaten Temanggung. Temanggung memiliki julukan sebagai Kota Tembakau karena tembakau menjadi komoditas utama dari sektor perkebunan dengan luas lahan pada tahun 2022 yaitu 15.801,15 ha dan jumlah produksinya mencapai 10.562,66 ton (BPS, 2023). Petani di Kabupaten Temanggung mayoritas menjual hasil tembakaunya dalam bentuk daun basah, pada tahun 2022 hanya terdapat sekitar 25% petani yang mengolah daun tembakau menjadi daun rajangan dari total jumlah petani tembakau sekitar 42.521 orang (BPS, 2023). Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan dari faktor biaya produksi yang akan berpengaruh terhadap penerimaan dan pendapatan yang diterima oleh petani. Pilihan untuk menjual daun tembakau dalam bentuk daun basah ataupun rajangan menjadi keputusan yang harus ditentukan petani agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui dan membandingkan pendapatan usahatani tembakau penjualan daun basah dan penjualan daun rajangan di Kabupaten Temanggung untuk memberikan pertimbangan pada petani dalam memilih sistem penjualan hasil tembakau yang tepat dan paling menguntungkan.

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis proses pelaksanaan usahatani tembakau daun basah dan daun rajangan di Kabupaten Temanggung.
2. Menganalisis dan membandingkan pendapatan usahatani tembakau daun basah dan daun rajangan di Kabupaten Temanggung.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, dapat meningkatkan keterampilan dan menambah wawasan pengetahuan terutama mengenai komparasi pendapatan usahatani tembakau daun basah dan daun rajangan.
2. Bagi petani, dapat menjadi sumber informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dalam memilih sistem penjualan tembakau dalam bentuk daun basah atau daun rajangan.
3. Bagi pembaca, sebagai sumber literasi yang dapat menambah informasi dan pengetahuan serta dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.
4. Bagi pemerintah, dapat menjadi gambaran sebagai bahan evaluasi untuk pertimbangan penentuan kebijakan selanjutnya terutama untuk pengembangan usahatani tembakau.